

**PENGARUH PAD, DANA PERIMBANGAN DAN BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS (BKK) TERHADAP BELANJA MODAL DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**Sagung Ayu Indira Chandra Kirana¹
Ida Ayu Nyoman Saskara²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: indirachandra.kirana@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali, menggunakan data sekunder Tahun 2013-2017 dengan teknik analisis jalur/*Path Anlisis*. Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, 2) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, 3) Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Belanja Modal, sedangkan Belanja Modal tidak memediasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Kata kunci: PAD, dana perimbangan, belanja modal

ABSTRACT

This research was conducted in nine districts / cities in Bali Province, using secondary data from 2013-2017 using path analysis / Path Anlisis techniques. The results of the analysis show that 1) regional original income and Special Financial Assistance (BKK) have a direct and significant effect on capital expenditure while the balancing fund has no significant effect on capital expenditure, 2) local revenue, balance funds, Special Financial Assistance (BKK) and expenditure capital has a significant effect on community welfare, 3) regional original income and Special Financial Assistance (BKK) have an effect on public welfare through capital expenditure, while capital expenditure does not mediate the effect of balancing funds on people's welfare.

Keywords: PAD, balance funds, capital expenditure

PENDAHULUAN

Human Development Report (1990) menyatakan pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia “*a process of enlarging peapole’s choise*”. Menurut *United Development Programme* (UNDP) indikator kesejahteraan masyarakat dikenal dengan *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia, indikator ini hadir sebagai salah satu cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat antar negara ataupun daerah (Todaro, 2009:57).

UNDP menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. Informasi mengenai perkembangan kesejahteraan masyarakat sangatlah penting karena dapat digunakan dalam proses perencanaan pembangunan baik pembangunan daerah maupun pembangunan manusianya, pembangunan manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusiannya yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah (Mega Rosita dan Sutrisna, 2018).

Berdasarkan Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali meningkat setiap tahunnya namun peningkatan cenderung rendah dan masih terdapat disparitas antar wilayah, dimana IPM pada Kota Denpasar lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Badung hal ini disebabkan karena faktor pendidikan di Kota Denpasar jauh lebih baik jika di bandingkan dengan Kabupaten Badung.

Tabel 1.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2017 (Persen)

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jembrana	68.39	68.67	69.66	70.38	70.72
Tabanan	72.31	72.68	73.54	74.19	74.86
Badung	77.63	77.98	78.86	79.80	80.54
Gianyar	74.00	74.29	75.03	75.70	76.09
Klungkung	68.08	68.30	68.98	69.31	70.13
Bangli	65.47	65.75	66.24	67.03	68.24
Karangasem	63.70	64.01	64.68	65.23	65.57
Buleleng	68.83	69.19	70.03	70.65	71.11
Denpasar	81.32	81.65	82.24	82.58	83.01
Provinsi Bali	72.09	72.48	73.27	73.65	74.30

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2018

Menurut Musgrave (1993), terdapat tiga fungsi pemerintah yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dapat terwujud dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah, untuk itu peran pemerintah sangat penting dalam proses pembangunan (Nurudeen, 2010).

Upaya dari pelaksanaan pembangunan pada setiap daerah merupakan bagian dari terselenggaranya pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu upaya pemerintah pusat untuk memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah dalam mengurus, mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip otonomi daerah tujuannya antara lain adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat karna pengambilan keputusan oleh pemerintah lokal akan lebih di dengar dalam memenuhi pilihan yang lebih berguna bagi efisiensi alokasi (Fajri, dkk., 2015) Kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan untuk pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan (Apilia, 2015). Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah

didukung pula oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam UU No.33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata acara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (Saragih, 2003).

Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, pemerintah pusat mendesentralisasikan sebagian besar fungsi dan sumber daya kepada pemerintah kabupaten/kota bukan provinsi (Fitriani, *et al.*, 2005). Selain dana perimbangan pemerintah pusat juga menganggarkan dana untuk desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang pemberdayaan dan pelestarian pengembangan adat istiadat, dimana lembaga adat berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu kepada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku, maka pemerintah Provinsi Bali memandang perlu mengalokasikan sejumlah anggaran berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pelestarian adat, seni dan budaya didasari oleh Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang desa pakraman, maka masyarakat dalam wadah desa pakraman mempunyai landasan yang kuat

untuk berperan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha merevitalisasi Desa Pakraman, Subak Abian dan Subak di Bali

Kaya akan budaya dan adat istiadat Bali dikenal sebagai tujuan pariwisata dunia, tentunya sektor pariwisata menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi di Bali (Oka Artana, 2015), dengan adanya daya tarik tersebut makapendapatan asli daerah Provinsi Bali cenderung besar, serta kontribusinya terus mengalami kenaikan dan akan mempengaruhi penerimaan daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan untuk memperbaiki pelayanan publik berupa pembangunan infrastruktur, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Delavallade, 2006). Menurut Felix (2012), penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program untuk pelayanan publik. Dalam pengeluaran insfrastruktur masih terus menjadi masalah karena dana alokasi yang tidak sepenuhnya digunakan dan susahnya koordinasi dengan pemerintah (Kong dan Arif, 2008).

Pembangunan daerah adalah proses berjalan antara pemerintah daerah dengan masyarakat melalui pengelolaan potensi dan juga sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah (Subandi, 2008:133). Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah tersebut, peningkatan PAD di harapkan dapat memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah dengan peningkatan investasi modal

(belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmoro, 2002).

Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD, hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Ulupui (2015) yang dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Darwanto (2007) dan Tuasikal (2008) memperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah terhadap belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, hal ini berarti jika semakin tinggi penerimaan daerah maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal akan meningkat. Jumlah pendapatan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kekuatan keuangan pemerintah daerah, semakin tingginya *revenue* pemerintah daerah maka kecil kemungkinan daerah untuk mengalami kesulitan keuangan dalam pendanaan infrastruktur bagi pembangunan pemerintah daerah (Jones dan Walker, 2007)

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang di alokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan dan melaksanakan desentralisasi. Sesuai dengan tujuan dari adanya belanja modal, maka apabila dana perimbangan yang didapat dalam jumlah yang kecil akan membuat biaya yang dikeluarkan untuk belanja modal akan sedikit. Belanja modal yang sedikit akan berdampak pada pemenuhan infrastruktur

yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjang dari penyediaan infrastruktur tersebut akan semakin menurun hal ini di dukung oleh penelitian yang di lakukan Irvan dan Karmini (2016) yang mengatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, ini berarti pengeluaran pemerintah daerah di sektor publik akan meningkatkan pula produktivitas penduduk. Peningkatan produktivitas penduduk akan berdampak terhadap pendapatan perkapita masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mega dan Sutrisna (2018) bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

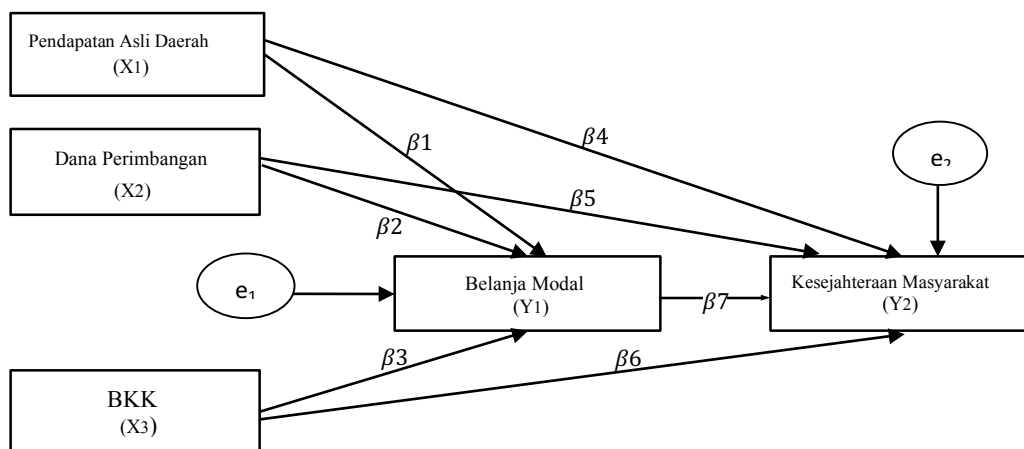
Berdasarkan Buku Pintar Dana Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Undang-Undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatankesejahteraan masyarakat desa. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar setiap tahunnya untuk desa, untuk itu Pemerintah Provinsi Bali memandang perlu mengalokasikan sejumlah anggaran untuk bantuan keuangan kepada desa Pakraman, Subak dan Subak Abian dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusyadi (2012) yang penelitiannya di lakukan pada Kabupaten Talakar mendapatkan hasil bahwa anggaran dana untuk desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Begitu juga pengaruh BKK terhadap belanja modal berdasarkan buku juknis BKK tahun

2017 dimana peruntukan BKK ini digunakan untuk membiayai wibaga yang berpedoman kepada Tri Hita Karana dengan memprioritaskan pelestarian adat seni dan budaya seperti peruntukan untuk pemeliharaan situs dan bangunan budaya atau pembuatan pembangunan lingkungan tempat suci sehingga hal ini tentunya akan menambah investasi dalam bidang belanja modal fisik.

Peningkatan infrastuktur publik dan penanaman modal pemerintah seperti pembenahan segala penunjang pendidikan, kesehatan dan prasarana lain yang dapat memaksimalkan pelayanan sektor publik secara berkesinambungan, hal tersebut tentu akan berdampak pada peningkatankesejahteraan masyarakat (Bati, 2009). Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi, investasi yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan tetapi juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat (Kusuma, 2016). Menurut Salih (2012), pengeluaran publik harus digunakan tepat sasaran. Belanja modal memiliki peran yang penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Kusreni (2009) dan Mirza (2012) yang mengatakan bahwa belanja modal memberi dampak positif dan pada kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah kerangka konsep penelitian:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Dari Konsep diatas dapat dilihat anak panah β_1 menunjukkan pengaruh secara langsung dari variabel X_1 terhadap variabel Y_1 . Anak panah β_2 menunjukkan pengaruh secara langsung dari variabel X_2 terhadap variabel Y_1 . Anak panah β_3 menunjukkan pengaruh secara langsung dari variabel X_3 terhadap variabel Y_1 . Anak panah β_4 menunjukkan pengaruh secara langsung dari variabel X_1 terhadap variabel Y_2 . Anak Panah β_5 menunjukkan pengaruh secara langsung dari variabel X_2 terhadap variabel Y_2 . Anak panah β_6 menunjukkan pengaruh langsung dari variabel X_3 terhadap variabel Y_2 . Anak panah β_7 menunjukkan pengaruh secara langsung dari variabel Y_1 terhadap Y_2 .

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang telah diuraikan, maka dapat diajukan rumusan hipotesis sebagai berikut:

- 1) pendapatan asli daerah, dana perimbangan, BKK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

- 2) pendapatan asli daerah, dana perimbangan, BKK dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 3) pendapatan asli daerah, dana perimbangan, BKK berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian dilakukan di sembilan Kabupaten/kota Provinsi Bali dengan alasan bahwa Indeks Pembangunan Manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali meningkat setiap tahunnya namun peningkatan cenderung rendah dan masih terdapat disparitas antar wilayah, dimana IPM pada Kota Denpasar lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Badung hal ini disebabkan karena faktor pendidikan di Kota Denpasar jauh lebih baik jika di bandingkan dengan Kabupaten Badung.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui belanja modal sebagai variabel intervening periode 2013-2017 dan data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan BPKAD Provinsi Bali (www.bps.go.id).

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis jalur (*Path Analysis*). Koefisien jalur adalah standardized koefisien regresi, koefisien jalur di hitung dengan membuat dua persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan. Dalam hal ini dua persamaan tersebut adalah:

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = \beta_4 X_1 + \beta_5 X_2 + \beta_6 X_3 + \beta_7 Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Standardize koefisien pada persamaan (1) akan memberikan nilai $\beta_1, \beta_2,$ dan β_3
 standardize koefisien pada persamaan (2) akan memberikan nilai $\beta_4, \beta_5, \beta_6$ dan β_7 .
 Nilai kekeliruan taksiran standar (*standard error of estimate*), yaitu:

$$e_i = \sqrt{(1 - R^2)} \dots \dots \dots (3)$$

Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan:

$$R_m^2 = 1 - P_{e1}^2 P_{e2}^2 \dots \dots \dots (4)$$

Dalam hal ini interpretasi terhadap R_m^2 sama dengan interpretasi koefisien determinasi (R^2) pada analisis regresi. P_{ei} yang merupakan *standard error of estimate* dari model regresi dihitung dengan rumus:

$$P_{ei} = \sqrt{(1 - R^2)} \dots \dots \dots (5)$$

Keterangan:

- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = jalur X_1, X_2, X_3 terhadap Y_1
- $\beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7$ = jalur X_1, X_2, X_3, Y_1 terhadap Y_2
- $\beta_1 \beta_7$ = jalur X_1 terhadap Y_1 (β_1) dengan jalur Y_1 terhadap Y_2 (β_7)
- $\beta_2 \beta_7$ = jalur X_2 terhadap Y_1 (β_2) dengan jalur Y_1 terhadap Y_2 (β_7)
- $\beta_3 \beta_7$ = jalur X_3 terhadap Y_1 (β_3) dengan jalur Y_1 terhadap Y_2 (β_7)
- e_1, e_2 = variabel pengganggu (*error term*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesejahteraan merupakan tujuan dari setiap daerah, segala sesuatu di lakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, seperti pembangunan infrastruktur baik di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Informasi mengenai perkembangan kesejahteraan masyarakat sangatlah penting karena dapat digunakan dalam proses perencanaan pembangunan baik pembangunan daerah maupun pembangunan manusianya, pembangunan

manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah (Mega Rosita dan Sutrisna, 2018).

Tabel 2.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/kota
Provinsi Bali tahun 2013-2017 (Persen)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Jembrana	68.39	68.67	69.66	70.38	70.72
Tabanan	72.31	72.68	73.54	74.19	74.86
Badung	77.63	77.98	78.86	79.80	80.54
Gianyar	74.00	74.29	75.03	75.70	76.09
Klungkung	68.08	68.30	68.98	69.31	70.13
Bangli	65.47	65.75	66.24	67.03	68.24
Karangasem	63.70	64.01	64.68	65.23	65.57
Buleleng	68.83	69.19	70.03	70.65	71.11
Denpasar	81.32	81.65	82.24	82.58	83.01
Provinsi Bali	72.09	72.48	73.27	73.65	74.30

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2018

Tabel 2 menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM, berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat IPM Provinsi Bali terus mengalami peningkatan yang artinya, penduduk di Provinsi Bali memiliki tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan perkapita di atas rata-rata yang dicapai, tingkat kesejahteraan Provinsi Bali terus meningkat dari tahun 2013-2017 namun masih terjadi disparitas antar wilayah dimana IPM pada Kota Denpasar lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Badung hal ini bisa disebabkan karena faktor pendidikan di Kota Denpasar jauh lebih baik jika di bandingkan dengan Kabupaten Badung.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva guna melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Salah satu komponen belanja daerah adalah belanja modal, belanja modal yaitu belanja publik yang manfaatnya dapat langsung dinikmati masyarakat misalnya belanja pembangunan jembatan, jalan dan perbaikan fasilitas umum lainnya.

Tabel 3.
Perkembangan Realisasi Belanja Modal Kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Jembrana	142.86	161.85	185.95	324.63	243.74
Tabanan	128.18	136.35	112.97	257.06	290.56
Badung	766.71	949.07	922.77	1.195.12	1.241.11
Gianyar	185.32	201.18	224.18	309.91	409.36
Klungkung	64.09	99.82	119.33	144.10	188.79
Bangli	62.76	70.22	110.71	250.22	158.61
Karangasem	180.73	177.56	117.55	257.05	237.06
Buleleng	185.89	183.62	183.62	345.14	295.22
Denpasar	254.08	234.64	192.31	257.66	251.62
Provinsi Bali	2.306.56	2.213.71	2.272.99	3.274.31	3.660.43

Sumber: BPS Provinsi, 2018

Tabel 3 menunjukkan Belanja modal tertinggi ada pada Kabupaten Badung ini bisa dikarenakan dari beberapa faktor seperti halnya PAD, semakin tinggi PAD akan mengakibatkan alokasi belanja modal juga semakin tinggi. Menurut Wagner apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat (Mangkoesoebroto, 1993:171).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Bali merupakan daerah yang pendapatan daerahnya sebagian besar berasal dari sektor pariwisata sehingga beberapa kabupaten di Bali memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi atau lebih tinggi dibandingkan daerah yang mengandalkan pendapatan selain sektor pariwisata. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan rutin Pemerintah Provinsi Bali (BPS Provinsi Bali, 2017).

Tabel 4.
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Bali tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Jembrana	68.49	34.38	41.33	46.47	68.49
Tabanan	255.42	273.43	300.80	318.10	426.63
Badung	850.17	979.24	1.406.30	1.870.19	2.279.11
Gianyar	319.61	424.47	450.72	529.86	662.75
Klungkung	67.42	98.83	120.03	134.14	153.21
Bangli	55.98	76.14	87.73	104.82	104.59
Karangasem	168.65	239.42	243.12	318.08	198.57
Buleleng	160.29	219.68	282.11	293.03	455.19
Denpasar	658.97	698.73	776.21	807.05	1.008.72
Provinsi Bali	2.529.80	2.920.41	4.304.12	5.041.19	6.398.47

Sumber: BPS Provinsi, 2018

Berdasarkan Tabel 4 pendapatan asli daerah dari tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dari tahun ke tahun memiliki PAD tertinggi di dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bali, ini dikarenakan pengelolaan potensi daerah Kabupaten Badung sudah baik, karena Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sendiri memiliki berbagai destinasi pariwisata sehingga memiliki banyak pajak bangunan yang membuat PAD Kabupaten Badung dan Kota Denpasar tinggi. PAD masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Bali tiap tahun selalu mengalami peningkatan namun PAD Kabupaten Badung dan Kota Denpasar masih dibawah PAD Provinsi Bali.

Dana perimbangan bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan dan melaksanakan desentralisasi. Otonomi daerah hingga saat ini masih belum optimal, hal ini dikarenakan banyak masalah yang muncul mulai dari kondisi geografis, kekayaan alam, serta potensi daerah yang berbeda-beda. Potensi daerah yang berdeba-beda inilah yang menciptakan kemampuan keuangan daerah yang berbeda-

beda pula dalam memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

Pada Tabel 5 menunjukkan dana perimbangan yang paling besar diterima adalah pada tahun 2016 dan 2017 yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan. Hingga saat ini dana perimbangan sangat membantu dalam pembangunan daerah, dana perimbangan rata-rata provinsi masih tinggi di bandingkan dengan yang diperoleh kabupaten/kota, dalam tabel Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan mendapat dana perimbangan tertinggi, namun masih berada di bawah dana perimbangan Provinsi Bali.

Tabel 5.
Pekembangan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Jembrana	517.83	546.79	577.46	707.07	727.75
Tabanan	734.58	799.77	815.84	1.102.26	1.096.28
Badung	429.80	381.71	332.25	543.32	555.88
Gianyar	690.82	694.46	673.56	905.91	916.51
Klungkung	496.92	532.95	542.01	699.51	653.54
Bangli	513.01	546.40	569.34	752.41	917.12
Karangasem	644.19	695.60	695.40	510.26	949.13
Buleleng	907.85	594.75	947.57	1.305.60	1.788.31
Denpasar	661.10	693.24	681.68	878.19	851.68
Provinsi Bali	980.71	1.785.43	2.831.19	3.389.01	4.357.99

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2018

Bantuan Keuangan Khusus merupakan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi untuk masyarakat desa yang dialokasikan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam usaha merevitalisasi Desa Pakraman, Subak Abian dan Subak di Bali, terutama dalam pelestarian unsur-unsur Tri Hita Karana untuk itu Pemerintah Provinsi Bali memandang perlu mengalokasikan sejumlah anggaran untuk memberikan bantuan

keuangan kepada desa Pakraman, Subak dan Subak Abian dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus.

Tabel 6.

Perkembangan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Jembrana	150.00	797.47	825.00	650.00	330.67
Tabanan	230.00	416.58	403.00	969.44	259.52
Badung	205.00	260.28	205.00	205.00	205.00
Gianyar	205.00	817.73	741.96	560.82	232.98
Klungkung	336.40	847.31	403.00	995.15	764.15
Bangli	220.00	543.03	455.64	488.38	759.33
Karangasem	565.00	933.99	944.59	981.13	1.175.41
Buleleng	350.00	208.92	777.66	811.02	673.92
Denpasar	250.00	555.21	250.00	250.00	418.85
Provinsi Bali	2.511.40	4.076.50	4.975.85	4.909.97	5.797.41

Sumber: BPKAD Provinsi Bali, 2018

Berdasarkan Tabel 6 dana BKK masih berfluktuasi dan pada tahun 2017 Kabupaten Karangasem mendapatkan dana BKK yang tertinggi dan Kabupaten Badung yang mendapatkan dana BKK yang terendah, hal ini bisa saja terjadi karena Kabupaten Karangasem merupakan Kabupaten yang mempunyai IPM yang terendah.

Pengujian struktur pertama yaitu pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) terhadap belanja modal. Pengujian dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan BKK secara langsung terhadap belanja modal. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS.

Tabel 7.
Hasil Uji Regresi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan BKK terhadap Belanja modal

Model	Nilai t	Signifikan
PAD	2,547	0,005
Dana Perimbangan	1,803	0,17
BKK	-2,252	0,33

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel 7 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dengan nilai sig. $0,017 < 0,05$ menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Dana perimbangan dengan nilai sig. $0,083 > 0,05$ menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan nilai sig. $0,033 < 0,05$ menunjukkan bahwa BKK berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh negatif terhadap belanja modal.

Pengujian struktur kedua yaitu pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengujian dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, BKK dan belanja modal secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS.

Tabel 8.
Hasil Uji Regresi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, BKK dan Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Model	Nilai t	Signifikan
PAD	2,445	0,019
Dana Perimbangan	3,168	0,003
BKK	1,946	0,059
Belanja Modal	4,176	0,025

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel 8 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dengan nilai sig. $0,019 < 0,05$ menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh

positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dana perimbangan dengan nilai sig. $0,003 < 0,05$ menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan nilai sig. $0,059 \geq 0,05$ menunjukkan bahwa BKK berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Belanja modal dengan nilai sig. $0,025 < 0,05$ menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hubungan antar variabel penelitian yang merupakan koefisien jalur, dalam penelitian ini model tersebut juga dapat dinyatakan sebagai berikut.

Persamaan struktur 1

$$Y_1 = 0,450 X_1 + 0,356 X_2 - 0,366 X_3 + e_1$$

Persamaan struktur 2

$$Y_2 = 1,249 X_1 + 0,450 X_2 + 0,268 X_3 + 0,478 X_4 + e_2$$

Untuk mengetahui nilai e_1 yang menunjukkan jumlah varian variabel belanja modal (Y_1) yang tidak dijelaskan oleh PAD (X_1), dana perimbangan (X_2), BKK (X_3), dihitung menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} e_1 &= \sqrt{1 - R^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,543} \\ &= 0,676 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui nilai e_2 yang menunjukkan jumlah varian variabel kesejahteraan masyarakat (Y_2) yang tidak dijelaskan oleh PAD (X_1), dana

perimbangan (X_2), BKK (X_3) dan belanja modal (Y_2), dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} e_2 &= \sqrt{1 - R^2} \\ &= \sqrt{1 - 488} \\ &= 0,716 \end{aligned}$$

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - (Pe_1)^2 (Pe_2)^2 \\ &= 1 - (0,676)^2 (0,716)^2 \\ &= 1 - (0,456) (0,512) \\ &= 0,77 \end{aligned}$$

Keterangan:

R^2_m = koefisien determinasi total

e_1, e_2 = nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah sebesar 77 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 77 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 23 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Oleh karena nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,450 dan level of signifikan sebesar $0,017 < 0,05$ ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya pendapatan asli daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal (Y_1)

Pengaruh positif dan signifikan antara variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja modal ini sesuai dengan hukum Wagner, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat (Mangkoesobroto, 1993:171). Hasil penelitian ini juga didukung oleh Sanghee (2010), Joulfaian & Mokeerjee, (1990); Legrenzi & Milas, (2001); Aziz *et al.*, (2000); Von Furstenberg *et al.*, (1986); Blackley, (1986) yang mengatakan bahwa PAD dapat berpengaruh terhadap anggaran belanja pada pemerintah daerah. Menurut Cheng (1999), beberapa Negara yang termasuk di wilayah Amerika Latin, bahwa pajak mempengaruhi belanja pada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dijelaskan bahwa besar kecilnya PAD menentukan besar kecilnya belanja modal, sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja publik dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan belanja modal, maka pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya. Hal ini mengindikasikan kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahannya telah memiliki kemampuan yang cukup besar tanpa harus terlalu bergantung pada dana perimbangan dalam mendanai pembiayaan daerah khususnya untuk belanja modal. Ini berarti pengalokasian PAD untuk belanja pembangunan yang dilaksanakan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah berhasil.

Oleh karena nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,356 dan level of signifikan sebesar $0,083 > 0,05$ ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya dana perimbangan (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y_1)

Dana perimbangan dengan nilai sig. $0,083 > 0,05$ menunjukan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurmala Sari., dkk (2017) dan Tuasikal (2008) ini berarti tingkat kemandirian pemerintah dalam membiayai pembangunan di daerah, terutama untuk belanja modal tidak tergantung pada *transfer* pemerintah pusat. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Holz-Eakin et.,al (1994) yang mengatakan bahwa terdapat suatu keterkaitan yang sangat erat antara *transfer* dipemerintah pusat dengan belanja dipemerintah daerah. Hal ini membuktikan dengan adanya desentralisasi fiskal maka alokasi belanja modal ini ditentukan oleh kondisi dan pertanggungjawaban dari masing-masing pemerintah daerah terhadap pelayanan masyarakat bukan berdasarkan dana *transfer* dari pemerintah pusat. Oleh karena nilai *standardized coefficient beta* sebesar $-0,366$ dan level of signifikan sebesar $0,033 < 0,05$ ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya BKK (X_3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal (Y_1)

Pengaruh negatif dan signifikan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Nurhidayanti (2013), dimana dikatakan bahwa semakin besar porsi anggaran belanja tidak langsung, maka semakin kecil alokasi anggaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah belanja modal. Bantuan Keuangan Khusus merupakan Program bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk mensejahterakan desa pakraman, subak dan subak abian dimana anggaran BKK ini diambil dari anggaran belanja bantuan keuangan yang masuk ke dalam anggaran belanja tidak langsung pemerintah Provinsi Bali.

Oleh karena nilai *standardized coefficient beta* sebesar 1,249 dan level of signifikan sebesar $0,019 < 0,05$ ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya pendapatan asli daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2)

Pengaruh positif dan signifikan ini sesuai dengan penelitian Mahendra dan Ulupui (2015) serta Darwanto (2007), menurut teori yang ada peningkatan pendapatan asli daerah akan menimbulkan eksternalitas yang positif dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sasana, 2009). PAD dalam prosesnya sebagai pendapatan suatu daerah akan menjadi dana pemerintah dalam melakukan pembangunan daerah melalui belanja daerah guna mencapai tujuan kesejahteraan. PAD harus dialokasikan lebih untuk belanja modal seperti belanja pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan potensi wilayah sehingga komponen dalam IPM mampu meningkat.

Oleh karena nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,450 dan level of signifikan sebesar $0,003 < 0,05$ ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya dana perimbangan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2)

Pengaruh positif dan signifikan ini sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 33 dan 34 tahun 2004 dimana dana perimbangan di peruntukan untuk mendanai belanja publik terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Prinsip-prinsip

pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tanggung jawab, maupun memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, dan pengendalian (Haloman, dkk., 2011). Adanya pengaruh positif dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali sesuai dengan harapan dan pelaksanaan otonomi daerah yang dikemukakan oleh Mega dan Sutrisna (2018) serta Halim (2001) yang mengatakan bahwa kapasitas keuangan Pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, seperti melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pembangunan, dan melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat guna menyejahterakan masyarakat.

Oleh karena nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,268 dan level of signifikan sebesar $0,059 \geq 0,05$ ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya BKK (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (X_2)

Pengaruh positif dan signifikan ini berarti belanja bantuan keuangan melalui Bantuan Keuangan Khusus yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah berhasil, hal ini sesuai dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang desa pakraman, dimana masyarakat dalam wadah desa pakraman mempunyai landasan yang kuat untuk berperan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam usaha merevitalisasi Desa Pakraman, Subak Abian dan Subak di Bali.

Oleh karena nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,478 dan level of signifikan sebesar $0,025 < 0,05$ ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya belanja modal (Y_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2)

Pengaruh positif dan signifikan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Bati, 2009), Kusreni (2009) serta Mirza (2012) dimana dikatakan dalam penelitiannya bahwa belanja modal dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik, ini berarti belanja modal yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali sudah mampu meningkatkan komponen penunjang kesejahteraan. Dalam prosesnya, belanja modal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang menunjang pembangunan seperti pembangunan sekolah agar meratanya pendidikan di setiap daerah yang nantinya menciptakan SDM yang berkualitas.

Tabel 9.
Hasil Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total Variabel Penelitian Tahun 2013-2017

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung Melalui Y_1	
X1 → Y1	0,450		0,450
X1 → Y2	1,269	0,215	1,484
X2 → Y1	0,356		0,356
X2 → Y2	0,450	0,170	0,620
X3 → Y1	-0,366		-0,366
X3 → Y2	0,268	-0,174	0,368
Y1 → Y2	0,478		0,478

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 9 maka dapat dijelaskan bahwa pengaruh langsung PAD (X_1) terhadap belanja modal (Y_1) adalah 0,450 tidak ada pengaruh tidak langsung diantara variabel tersebut, sehingga pengaruh totalnya tetap 0,450. Pengaruh langsung PAD (X_1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2)

sebesar 1,269 dengan pengaruh tidak langsung melalui belanja modal (Y_1) adalah sebesar 0,215 ini berarti bahwa PAD berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal adalah sebesar 1,484.

Pengaruh langsung dana perimbangan (X_2) terhadap belanja modal (Y_1) adalah 0,365 tidak ada pengaruh tidak langsung diantara variabel tersebut, sehingga pengaruh totalnya tetap 0,365. Pengaruh langsung dana perimbangan (X_2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) sebesar 0,450 dengan pengaruh tidak langsung melalui belanja modal (Y_1) adalah sebesar 0,170 ini berarti bahwa dana perimbangan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal sebesar 0,620.

Pengaruh langsung BKK (X_3) terhadap belanja modal (Y_1) adalah -0,366 tidak ada pengaruh tidak langsung diantara variabel tersebut, sehingga pengaruh totalnya tetap -0,366. Pengaruh langsung BKK (X_3) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) sebesar 0,268 dengan pengaruh tidak langsung melalui belanja modal (Y_1) adalah sebesar -0,174 ini berarti bahwa BKK berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal sebesar 0,368.

Pengaruh langsung belanja modal (Y_1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) sebesar 0,478 tidak terdapat pengaruh tidak langsung diantara variabel tersebut, sehingga pengaruh totalnya 0,478.

SIMPULAN DAN SARAN

Pendapatan asli daerah, berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) berpengaruh negatif dan signifikan secara langsung terhadap

belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dan dana perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pendapatan asli daerah dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal, sedangkan belanja modal tidak memediasi pengaruh dana perimbangan terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pemerintah daerah disarankan agar terus menggali potensi-potensi yang dimiliki daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, guna mensejahterakan masyarakat melalui alokasi belanja modal untuk penyediaan infrastruktur daerah. Sehingga nantinya pemerintah dapat lebih mandiri dalam mendanai seluruh program/aktivitas pemerintahan dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap *transfer* dana dari pemerintah pusat. Selain itu, diharapkan anggaran belanja modal lebih diarahkan sesuai dengan kebutuhan daerah akan pemenuhan infrastruktur publik.

Pemerintah daerah juga disarankan dapat memaksimalkan pengalokasian dana untuk kepentingan belanja pembangunan (belanja modal) dibandingkan belanja rutin (belanja operasional) serta pemerintah daerah harus dapat menekankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan terkait dengan alokasi dana perimbangan agar tepat sasaran.

Dana BKK yang diberikan pemerintah daerah utamanya dari penerimaan daerah harus mampu dialokasikan tepat sasaran sesuai dengan tujuannya serta dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa, selain itu peran masyarakat juga tidak kalah penting untuk dapat ikut mengawasi dan berpartisipasi dalam upaya merevitalisasi Desa Pakraman, Subak Abian dan Subak di Bali terutama untuk pelestarian unsur-unsur Tri Hita Karana guna mensejahterakan masyarakat sehingga diharapkan sesuai dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2003 tentang desa pakraman.

REFERENSI

- Aziz, Mariam Abdul & M. Azali. 2000. *The Causal Relationship Between Tax Revenues and Government Spending In Malaysia. Journal of University Putra Malaysia.*
- Aprilia Kesuma, Ni Luh. 2015. Analisis Sektor Unggulan dan Pergeseran Pangsa Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Klungkung. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol.8 No.1
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2017. Provinsi Bali Dalam Angka. 2017. Bali: BPS Bali.
- Bati. 2009. Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten/Kota di Sumatra Utara). *Tesis*. Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Blackley, P, 1986. *Causality Between Revenues and Expenditures and The Size Federal Budget. Journal Public Finance Quarterly*, Vol.14 Hal: 139-156.
- Cheng, Benjamin S, 1999. *Causality Between Taxes And Expenditure: Evidence From Latin American Countries. Journal of Economics and Finance*, Vol.23 No.2 PP: 184-192.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Delavallade, Clara. 2006. *Corruption and Distribution Of Public Spending in Developing Countries. Journal Of Economics And Finance*, Vol.30 No.2 PP: 222-239.

- Fajri, Muhammad, Arman Delis, dan Yohanes Vyn Amzar. 2015. Dampak Ekonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol.9 No.2
- Felix, Olurankinse. 2012. *Analysis Of The Affectiveness Of Capital Expenditure Budgeting In The Local Government System Of Ondo State, Nigeria*. *Journal Of Accounting And Taxation*, Vol.4 No.1 PP: 1-6.
- Fitriani, Fitria, Bert Hofman, and Kai Kaiser. 2005. *Unity in Diversity? There Creation of New Local Government in a Decentralising Indonesia*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol.41 No.1 PP: 57-79.
- Halim, Abdul. 2001. *Menejemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta
- Haloman Hataluju, Agustina Sanggrangbano, dan Antonia K. Bonay. 2011. Kajian Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura pada Era Otonomi Khusus. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol.5 No.2
- Holtz-Eakin, Douglas, Harvey S. Rosen, & Schuyler Tilly. 1994. *Intertemporal Analysis of State in Local Government Spending: Theory and Test*. *Journal of Urban Economics*, Vol. 35 PP: 159-174..
- Irvan, I Putu dan Ni Luh Karmini. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol.5 No.3 Hal: 338-362.
- Jones, Stewart Dan R. G., Walker. 2007. *Explanators Of Local Government Distress*. *Journal Abacus*, Vol.43 No.3 PP: 396-418.
- Joulfaian, D & R. Mookerjee, 1990. *The Intertemporal Relationship Between State And Local Government Revenues And Expenditures: Evidence From OECD Countries*. *Journal Public Finance*, Vol.45 PP: 109-117.
- Kong, Tao. Arif Ramayanti. 2008. *Survey Of Recent Developments*. *Bulletin Of Indonesia Economic Studies*, Vol.44 No.1
- Kusreni, Sri Dan Sultan Suhab. 2009. Kebijakan APBD Dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol.5 No.3 Hal: 1-15.
- Kusuma, Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol.9 No.1
- Legrenzi, Gabriella & Costas Milas, 2001. *Non Linier And Asymmetric Adjustment In The Local Revenue-Expenditure Models: Some Evidence From The Italian Municipalities*. *Journal University of Milan*, Vol.5 No.1
- Mahendra dan Ulupui. 2015. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.11 No.3 Hal: 863-877.

- Mangkoesoebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. Edisi-III. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmoro. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mega Rosita, Ida Ayu dan I ketut Sutrisna. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol.7 No.7 Hal: 1445-1471.
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, Vol.1 No.1 Hal: 1-15.
- Musgrave, 1993. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*. Erlangga, Jakarta.
- Nurhidayanti, Lufki Laila dan Rizal Yaya. 2013. Alokasi Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik: Praktik di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol.17 No.2 Hal: 1410-2420.
- Nurmala Sari, Gustian Djuanda, Sarwani. 2017. Pengaruh Dana Perimbangan, Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Bodetabek Periode 2006-2015. *Jurnal Universitas Pamulang*, Vol.4 PP: 122-134.
- Nurudeen, A., & Usman. 2010. *Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria 1970-2008: A Dissagregate Analiys. Business and Economic Journal*, Vol.4. PP: 1-11.
- Oka Artana Yasa, I Komang dan Sudarsana Arka. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan antar Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol.4 No.2 Hal: 129-137.
- Rusyadi, Muhammad. 2012. Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Talakar. *Jurnal Ekonomi Blance*, Vol.8 No.2 Hal: 858-2192.
- Salih, Mohame Abdel Rahman. 2012. *The Realationship Between Economic Growth and Government Expenditure: Evidence From Sunda. International Business Research Journal*, Vol.5 No.8 PP: 40-46.
- Sanghee, Park. 2010. *The Choice for Scrutiny in Local Revenue Decisions: Case for California Counties 2001-2010. Journal*. PP: 1-33.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.

Sasana, Hadi. 2009. Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10 No.1 Hal: 103-124.

Subandi. 2008. Ekonomi Pembangunan. Bandung: Alfabeta.

Todaro, Michael. 2009. Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga. Edisi Kesembilan, Jakarta: Erlangga.

Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PDRB terhadap Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Vol.1 No.2 Hal: 141-155

Von Furstenberg, George M,R. Jeffery Green & Jin-Ho Jeong. 1986. *Tax And Spend, Or Spend And Tax?. Journal Review Of Economics And Statistic*,No.67 PP: 33-40.